



Akuntansi Syariah Sebagai Wujud Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Pelaporan Keuangan

Sharia Accounting as a Form of Implementation of Islamic Values in Financial Reporting

**Muammar Khadafi¹, Najla Zakya Rania², Saradilla³, Anna Fadhilla⁴, Hartika Mawarni⁵,
Wilda Fadira⁶, Rindi Agustin⁷**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh

Email: khaddafi@unimal.ac.id¹, najla.230420099@mhs.unimal.ac.id², saradilla.230420167@mhs.unimal.ac.id³,
anna.230420077@mhs.unimal.ac.id⁴, hartika.230420175@mhs.unimal.ac.id⁵, wilda.230420181@mhs.unimal.ac.id⁶,
rindy.230420087@mhs.unimal.ac.id⁷

Article Info

Article history :

Received : 19-12-2025

Revised : 21-12-2025

Accepted : 23-12-2025

Pulished : 25-12-2025

Abstract

Epistemologically, accounting is not merely a value-free technical instrument, but rather a social construct that reflects the ideology, culture, and theology of the society it uses. This review article explores the position of Islamic accounting as an antithesis to the conventional accounting paradigm rooted in secularism and capitalist materialism. The main focus of this study is how fundamental Islamic values, including the concepts of Tawhid (Oneness of God), 'Adl (Justice), Amanah (Accountability), and Siddiq (Honesty), are systematically integrated into the structure and practice of financial reporting. Through literature review and comparative analysis, this article identifies fundamental differences at the ontological and axiological levels between conventional accounting frameworks (IFRS/GAAP) and Islamic standards (AAOIFI/PSAK Syariah). The review demonstrates that Islamic accounting not only aims to provide information for economic decision-making but also serves as a tool for vertical accountability to Allah SWT and horizontal accountability to society. Performance measurement in this system goes beyond monetary profit metrics to include dimensions of social and spiritual well-being (Falah). Furthermore, this article examines specific reporting instruments such as the Zakat Source and Distribution Report and the Qardhul Hasan Report as manifestations of Islamic business ethics in minimizing economic disparities. This study concludes that the application of Islamic values in financial reporting significantly contributes to increasing transparency, mitigating creative accounting practices, and strengthening ethical organizational governance. The implications of this review emphasize the importance of harmonizing global accounting standards with Sharia principles without sacrificing their religious substance.

Keywords: *Sharia Accounting, Financial Reporting, Islamic Values*

Abstrak

Akuntansi secara epistemologis bukan sekadar instrumen teknis yang bebas nilai (*value-free*), melainkan sebuah konstruksi sosial yang mencerminkan ideologi, budaya, dan teologi masyarakat penggunanya. Artikel review ini mengeksplorasi posisi Akuntansi Syariah sebagai antitesis terhadap paradigma akuntansi konvensional yang berakar pada sekularisme dan materialisme kapitalistik. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana nilai-nilai fundamental Islam yang meliputi konsep *Tauhid* (Keesaan Allah), *'Adl* (Keadilan), *Amanah* (Pertanggungjawaban), dan *Shiddiq* (Kejujuran) diintegrasikan secara sistematis ke dalam struktur dan praktik pelaporan keuangan.



Melalui metode studi literatur dan analisis komparatif, artikel ini mengidentifikasi perbedaan fundamental pada tingkat ontologis dan aksiologis antara kerangka akuntansi konvensional (IFRS/GAAP) dengan standar syariah (AAOIFI/PSAK Syariah). Hasil ulasan menunjukkan bahwa Akuntansi Syariah tidak hanya bertujuan untuk menyajikan informasi bagi pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT dan akuntabilitas horisontal kepada masyarakat. Pengukuran kinerja dalam sistem ini melampaui metrik laba moneter dengan menyertakan dimensi kesejahteraan sosial dan spiritual (*Falah*). Lebih lanjut, artikel ini menelaah instrumen pelaporan spesifik seperti Laporan Sumber dan Penyaluran Zakat serta Laporan *Qardhul Hasan* sebagai manifestasi etika bisnis Islam dalam meminimalisir kesenjangan ekonomi. Kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam pelaporan keuangan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi, mitigasi praktik *creative accounting*, dan penguatan tata kelola organisasi yang etis. Implikasi dari tinjauan ini menekankan pentingnya harmonisasi antara standar akuntansi global dengan prinsip syariah tanpa mengorbankan substansi religiusitasnya.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Pelaporan Keuangan, Nilai Islam

PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade, akuntansi kerap dipandang secara reduksionis sebagai alat teknis yang bebas nilai, terbatas pada pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi. Namun, berbagai krisis keuangan global, mulai dari skandal Enron dan WorldCom hingga krisis subprime mortgage 2008, mendorong evaluasi ulang terhadap fondasi moral akuntansi konvensional. Fenomena tersebut menegaskan bahwa akuntansi bukanlah sistem yang netral, melainkan konstruksi sosial yang sarat nilai dan dipengaruhi oleh pandangan dunia masyarakat yang melahirkannya.

Akuntansi konvensional berakar pada paradigma kapitalisme-sekuler yang menempatkan maksimalisasi kekayaan pemegang saham sebagai tujuan utama serta memisahkan aktivitas bisnis dari nilai spiritual. Paradigma ini membuka ruang bagi praktik manipulatif seperti *creative accounting* yang mengabaikan keadilan sosial dan tanggung jawab moral. Sebagai respons atas kegagalan tersebut, Akuntansi Syariah hadir sebagai paradigma alternatif yang mengintegrasikan dimensi etika, spiritual, dan ekonomi secara utuh.

Akuntansi Syariah merupakan penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas muamalah dengan landasan bahwa seluruh sumber daya adalah amanah dari Allah SWT. Berbeda dengan teori entitas dalam akuntansi konvensional, Akuntansi Syariah berpijak pada *Shariah Enterprise Theory* yang menekankan pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat, alam, dan Tuhan. Pelaporan keuangan syariah tidak sekadar menyajikan informasi ekonomi, melainkan juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariat, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta nilai Tauhid, keadilan, amanah, dan kejujuran.

Artikel ini bertujuan mengkaji transformasi nilai-nilai Islam dalam praktik pelaporan keuangan melalui tinjauan literatur. Pembahasan difokuskan pada perbedaan mendasar antara akuntansi syariah dan konvensional serta kontribusi nilai-nilai Islam dalam mewujudkan transparansi yang beretika dan kesejahteraan holistik (*falah*).



TINJAUAN TEORI

1. Shariah Enterprise Theory (SET)

Dalam diskursus akuntansi konvensional, teori yang paling dominan adalah *Entity Theory* atau *Proprietary Theory*. Kedua teori ini memiliki satu kesamaan fundamental: menempatkan kepentingan pemilik modal (*shareholders*) sebagai prioritas utama. Fokus utamanya adalah maksimalisasi laba (*profit maximization*) yang sering kali mengabaikan eksternalitas sosial dan lingkungan.

Sebaliknya, Akuntansi Syariah berpijak pada *Shariah Enterprise Theory (SET)*. Teori ini dikembangkan untuk mengoreksi bias materialistik tersebut dengan menempatkan Allah SWT sebagai pusat (*God-centric*) dari seluruh realitas ekonomi. Berdasarkan SET, hakikat eksistensi sebuah entitas bisnis bukan hanya untuk memuaskan pemilik modal, melainkan untuk memenuhi amanah dari Allah SWT. Dalam kerangka ini, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dibagi menjadi tiga lapisan utama:

- Allah SWT sebagai Puncak Kekuasaan: Segala aktivitas bisnis harus tunduk pada hukum-Nya (Syariat) dan bertujuan untuk mencari keridaan-Nya.
- Manusia sebagai Khalifah: Mencakup *direct stakeholders* (investor, karyawan, pelanggan) dan *indirect stakeholders* (masyarakat luas) yang berhak atas distribusi keadilan ekonomi.
- Alam Semesta sebagai Titipan: Perusahaan memiliki kewajiban teologis untuk menjaga kelestarian ekosistem sebagai bentuk syukur atas sumber daya yang digunakan.

2. Konsep Kepemilikan dan Amanah

Landasan ontologis Akuntansi Syariah terletak pada pemahaman mengenai Kepemilikan Hakiki vs. Kepemilikan Majazi. Dalam sistem kapitalisme, kepemilikan pribadi dianggap mutlak (*absolute ownership*). Namun, dalam Islam, pemilik absolut atas segala sesuatu di langit dan di bumi hanyalah Allah SWT. Manusia hanya diberikan hak penguasaan sementara yang bersifat nisbi (*pseudo-ownership*).

Konsep ini melahirkan prinsip Amanah. Harta atau aset yang tercatat dalam neraca perusahaan tidak dipandang sebagai kekuasaan penuh manajemen, melainkan sebagai titipan yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Implikasi praktis dari konsep amanah ini adalah:

- Kewajiban Zakat: Zakat bukan dipandang sebagai biaya atau pengurangan laba, melainkan hak kaum miskin yang "menitip" pada harta perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi zakat menjadi elemen struktural, bukan sekadar pelengkap CSR.
- Etika Perolehan: Harta harus diperoleh melalui cara yang *thayyib* (baik) dan bebas dari unsur haram, karena setiap rupiah yang masuk akan dihisab sumbernya.

3. Konsep Akuntabilitas Ganda (*Dual Accountability*)

Akuntabilitas dalam akuntansi syariah melampaui konsep transparansi administratif semata. Jika akuntansi konvensional hanya mengenal akuntabilitas satu dimensi (kepada manusia), maka akuntansi syariah menerapkan *Dual Accountability*:



- a. Akuntabilitas Vertikal: Merupakan pertanggungjawaban tertinggi manusia kepada Allah SWT. Kesadaran bahwa setiap tindakan pencatatan dan pelaporan disaksikan oleh Allah (*muraqabah*) menjadi fungsi kontrol internal yang paling efektif untuk mencegah kecurangan. Hal ini menjadikannya sebuah bentuk ibadah dalam ranah muamalah.
- b. Akuntabilitas Horizontal: Pertanggungjawaban kepada sesama manusia dan lingkungan. Perusahaan wajib menyajikan informasi yang jujur kepada investor dan kreditor (akuntabilitas ekonomi), serta laporan mengenai kontribusi sosial dan dampak lingkungan (akuntabilitas sosial).

Sinergi antara kedua dimensi ini memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memberikan ketenangan spiritual bagi para penggunanya bahwa entitas tersebut beroperasi dalam koridor syariat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep-konsep teoretis dan filosofis yang mendasari akuntansi syariah serta bagaimana nilai-nilai Islam diinternalisasikan ke dalam praktik pelaporan keuangan.

1. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Data yang digunakan dalam kajian ini sepenuhnya berasal dari sumber sekunder yang memiliki otoritas tinggi dalam bidang akuntansi dan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap literatur-literatur berikut:

- a. Regulasi dan Standar: Menelaah standar global seperti *International Financial Reporting Standards* (IFRS) serta standar spesifik syariah seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- b. Literatur Akademik: Meninjau jurnal ilmiah bereputasi, prosiding konferensi, dan buku teks yang membahas teori akuntansi syariah, etika bisnis Islam, dan filsafat ekonomi Islam.
- c. Dokumen Kebijakan: Laporan tahunan perbankan atau lembaga keuangan syariah sebagai contoh implementasi praktis nilai-nilai Islam.

2. Pendekatan Analisis

Analisis dilakukan melalui dua pendekatan utama untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif:

- a. Ulasan Kritis (*Critical Review*): Melakukan evaluasi terhadap kelemahan paradigma akuntansi konvensional yang bersifat materialistik-sekuler dan bagaimana akuntansi syariah menawarkan solusi atas kelemahan tersebut.
- b. Analisis Komparatif: Membandingkan secara sistematis antara kerangka akuntansi konvensional dan syariah melalui tiga dimensi filosofis:



- 1) Ontologi: Membandingkan hakikat keberadaan dan tujuan entitas bisnis (Maksimalisasi laba vs. Pencapaian *Falah*).
- 2) Epistemologi: Membandingkan sumber ilmu pengetahuan yang digunakan (Rasionalitas manusia vs. Integrasi Wahyu dan Akal).
- 3) Aksiologi: Membandingkan nilai guna atau tujuan akhir dari pelaporan keuangan (Kegunaan keputusan vs. Akuntabilitas Teologis dan Sosial).

3. Tahapan Penelitian

Proses penelitian ini mengikuti alur sistematis yang dimulai dari identifikasi masalah terkait krisis moral dalam akuntansi, pengumpulan literatur yang relevan, reduksi data untuk memfokuskan pada integrasi nilai-nilai Islam, hingga penarikan kesimpulan yang menyintesis bagaimana nilai Islam mengubah wajah pelaporan keuangan dari sekadar angka menjadi instrumen etika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paradigma Akuntansi Islam

Memahami Akuntansi Syariah memerlukan dekonstruksi terhadap paradigma akuntansi modern yang selama ini didominasi oleh rasionalitas ekonomi dan orientasi material. Landasan teoritis akuntansi syariah tidak dibangun semata-mata di atas pertimbangan efisiensi dan keuntungan finansial, melainkan berpijak pada wahyu (revelation) yang diintegrasikan dengan akal manusia. Paradigma ini menempatkan akuntansi sebagai instrumen pertanggungjawaban moral dan spiritual, bukan sekadar alat teknis pencatat transaksi. Dalam kerangka tersebut, pembahasan akuntansi syariah bertumpu pada dua pilar utama, yaitu Shariah Enterprise Theory dan konsep kepemilikan dalam perspektif Islam, yang kemudian melahirkan konsep akuntabilitas ganda.

a. Shariah Enterprise Theory (SET)

Dalam akuntansi konvensional, teori yang paling dominan adalah Entity Theory, yang memandang perusahaan sebagai entitas terpisah dari pemiliknya, namun pada akhirnya beroperasi untuk memenuhi kepentingan pemilik modal melalui prinsip shareholder primacy. Konsekuensinya, pelaporan keuangan difokuskan pada pengukuran laba dan peningkatan nilai ekonomi bagi pemegang saham.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, Akuntansi Syariah berpijak pada Shariah Enterprise Theory (SET) yang dikembangkan oleh pemikir akuntansi Islam seperti Meutia dan Triyuwono. SET memperluas cakupan pemangku kepentingan dengan menempatkan Allah SWT sebagai pusat (God-centric) dari seluruh aktivitas ekonomi. Allah dipandang sebagai pemberi amanah sekaligus pemilik absolut atas seluruh sumber daya, sehingga tujuan utama akuntansi adalah memastikan bahwa aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, SET mengakui manusia—baik sebagai pemangku kepentingan langsung seperti karyawan, pelanggan, dan pemegang saham, maupun pemangku kepentingan tidak langsung seperti masyarakat luas—sebagai pihak yang memiliki hak atas distribusi keadilan dan kesejahteraan. Lebih jauh, alam semesta juga dipandang sebagai



pemangku kepentingan yang harus dijaga kelestariannya sebagai bagian dari tanggung jawab teologis manusia.

Dengan kerangka SET, laporan keuangan tidak lagi terbatas pada penyajian laba bersih (bottom line), tetapi juga mencerminkan sejauh mana perusahaan telah menjalankan fungsi sosial dan religiusnya, seperti kepatuhan terhadap akad-akad syariah, pengelolaan zakat, serta kontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan.

b. Konsep Kepemilikan dan Amanah

Perbedaan ontologis yang mendasar antara paradigma akuntansi Islam dan sekuler terletak pada konsep kepemilikan. Dalam sistem kapitalisme, kepemilikan pribadi dipandang bersifat mutlak dan bebas dari keterikatan moral tertentu. Sebaliknya, dalam Islam, kepemilikan manusia bersifat nisbi dan sementara. Harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia berperan sebagai khalifah fil ardh yang diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab.

Konsep kepemilikan sebagai amanah memiliki implikasi langsung terhadap praktik akuntansi. Aset tidak dipandang semata-mata sebagai alat akumulasi kekayaan, melainkan sebagai titipan yang harus dipertanggungjawabkan baik dari sisi cara perolehan maupun penggunaannya. Selain itu, adanya hak sosial dalam harta yang dikelola, seperti kewajiban zakat, menjadikan dimensi sosial melekat secara inheren dalam struktur laporan keuangan syariah. Dengan demikian, tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif Islam bukanlah pilihan sukarela sebagaimana konsep corporate social responsibility dalam akuntansi konvensional, melainkan kewajiban yang bersifat normatif dan teologis.

c. Konsep Akuntabilitas Ganda

Paradigma akuntansi Islam juga melahirkan konsep dual accountability atau akuntabilitas ganda. Akuntansi konvensional pada umumnya hanya mengenal akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban perusahaan kepada investor dan kreditor. Akuntansi syariah memperluas dimensi tersebut dengan menambahkan akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT.

Setiap transaksi dan pencatatan akuntansi diyakini akan dipertanggungjawabkan di hadapan dua entitas, yakni auditor manusia di dunia dan Allah SWT di akhirat. Kesadaran akan pengawasan Tuhan (muraqabah) inilah yang berfungsi sebagai pengendalian internal paling fundamental dalam mencegah manipulasi dan kecurangan laporan keuangan. Dengan demikian, pelaporan keuangan dalam Islam tidak hanya bertujuan mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk meraih falah, yaitu kesuksesan yang mencakup keseimbangan antara kesejahteraan material, ketenangan spiritual, dan keadilan sosial.

2. Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pelaporan Keuangan

Penerapan akuntansi syariah tidak hanya merepresentasikan perubahan teknis dalam sistem pencatatan keuangan, tetapi merupakan proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam seluruh siklus akuntansi. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai landasan etis yang menuntun pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi keuangan agar selaras dengan prinsip syariat.

**a. Nilai Tauhid sebagai Landasan Akuntabilitas Vertikal**

Nilai tauhid menempatkan kesadaran akan keesaan Allah SWT sebagai fondasi utama dalam praktik akuntansi syariah. Dalam pelaporan keuangan, tauhid membangun akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan atas seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan. Kesadaran ini mendorong akuntan untuk memandang pekerjaannya sebagai bagian dari ibadah dalam ranah muamalah. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat informasi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembuktian bahwa harta yang dikelola diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga meminimalkan kecenderungan terhadap praktik kecurangan.

b. Nilai ‘Adl (Keadilan) dalam Penilaian dan Pengukuran

Keadilan (‘adl) dalam Islam dimaknai sebagai upaya menempatkan sesuatu pada proporsinya dan memberikan hak kepada pihak yang berhak. Dalam pelaporan keuangan syariah, nilai ini tercermin dalam mekanisme pembagian hasil dan penanggungjawabannya risiko secara adil. Pada akad mudharabah, misalnya, penentuan nisbah bagi hasil harus disepakati secara transparan sejak awal, sementara kerugian finansial ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Selain itu, prinsip keadilan juga memengaruhi metode pengukuran, di mana akuntansi syariah cenderung mendorong penggunaan nilai wajar, khususnya dalam perhitungan zakat, karena dianggap lebih merefleksikan kondisi kekayaan yang sesungguhnya dibandingkan harga perolehan historis semata.

c. Nilai Amanah sebagai Dasar Transparansi dan Pertanggungjawaban

Nilai amanah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi merupakan sebuah titipan yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Dalam konteks korporasi, manajemen dan akuntan dipandang sebagai pemegang amanah tidak hanya dari pemilik modal, tetapi juga dari masyarakat luas. Prinsip amanah menuntut adanya pengungkapan informasi yang memadai dan jujur atas seluruh hal yang bersifat material, sehingga tidak menimbulkan asimetri informasi. Dalam akuntansi syariah, amanah juga diwujudkan melalui pemisahan yang jelas antara pendapatan halal dan non-halal. Apabila terdapat pendapatan non-halal yang diperoleh secara tidak sengaja, perusahaan wajib mengungkapkannya secara terpisah, misalnya melalui laporan dana kebajikan atau dana sosial.

d. Nilai Shiddiq (Kejujuran) dalam Penyajian Informasi Keuangan

Kejujuran (shiddiq) merupakan nilai fundamental yang menjamin keandalan laporan keuangan. Shiddiq menuntut kesesuaian antara pencatatan akuntansi dan realitas ekonomi yang terjadi. Nilai ini menjadi penangkal terhadap praktik manipulatif seperti window dressing atau rekayasa laporan keuangan demi kepentingan tertentu. Dalam akuntansi syariah, kejujuran tercermin dalam pengakuan pendapatan dan beban secara tepat waktu, penilaian aset yang wajar, serta penghindaran segala bentuk penipuan (tadlis). Dengan demikian, keandalan laporan keuangan tidak hanya ditopang oleh standar teknis, tetapi juga oleh komitmen moral para pelaksananya.



e. Nilai Istiqamah dalam Konsistensi Kebijakan Akuntansi

Nilai istiqamah tercermin dalam konsistensi penerapan kebijakan akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya. Islam melarang perubahan kebijakan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan manipulasi laba atau pencitraan kinerja keuangan. Konsistensi ini memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan dalam melakukan analisis perbandingan antarperiode. Dengan berpegang pada nilai istiqamah, pelaporan keuangan syariah menjadi tidak hanya konsisten secara teknis, tetapi juga kokoh secara etis.

3. Perbandingan Kerangka Kerja: Syariah Vs Konvensional

Untuk memahami sejauh mana nilai-nilai Islam mengubah postur pelaporan keuangan, kita perlu menelaah perbedaan kerangka konseptual antara Akuntansi Syariah (berdasarkan AAOIFI dan PSAK Syariah) dengan Akuntansi Konvensional (IFRS/GAAP). Perbedaan ini bukan sekadar teknis, melainkan bersifat paradigmatis.

a. Tujuan Laporan Keuangan

Dalam kerangka konvensional, tujuan utama adalah menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor untuk memprediksi arus kas masa depan dan menilai profitabilitas (*decision usefulness objective*).

Dalam Akuntansi Syariah, tujuannya lebih luas. Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), tujuan laporan keuangan adalah:

- 1) Kepatuhan Syariah: Memberikan informasi tentang kepatuhan entitas terhadap prinsip syariah dalam seluruh operasionalnya.
- 2) Akuntabilitas Zakat: Memberikan informasi yang memungkinkan penghitungan zakat secara akurat atas kekayaan perusahaan.
- 3) Fungsi Sosial: Melaporkan sumber dan penggunaan dana kebijakan (zakat, infak, sedekah, dan wakaf).

b. Struktur dan Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan konvensional umumnya hanya terdiri dari Neraca, Laba Rugi, Perubahan Ekuitas, dan Arus Kas. Akuntansi Syariah memperluas struktur ini untuk mengakomodasi tanggung jawab sosial dan teologis.

Beberapa komponen tambahan yang wajib ada dalam laporan keuangan syariah menurut PSAK 101 adalah:

- 1) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat: Menunjukkan transparansi perusahaan sebagai amil atau pembayar zakat.
- 2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (Qardhul Hasan): Melaporkan dana sosial yang digunakan untuk membantu pihak yang membutuhkan tanpa imbalan komersial.



- 3) Laporan Arus Kas Syariah: Yang secara ketat memisahkan aliran kas dari aktivitas halal dan non-halal (jika ada).

c. Konsep Pengakuan dan Pengukuran

Salah satu perbedaan paling teknis terletak pada dasar pengukuran. Akuntansi konvensional sangat mengandalkan *Historical Cost* karena dianggap objektif dan dapat diverifikasi. Namun, Akuntansi Syariah seringkali berargumen bahwa *Historical Cost* tidak relevan untuk perhitungan zakat yang adil.

- 1) Penerapan Nilai Wajar (*Fair Value*): Dalam akuntansi syariah, penggunaan nilai pasar saat ini sangat dianjurkan untuk menghitung basis zakat. Hal ini mencerminkan nilai kejujuran (*Shiddiq*) dan keadilan (*'Adl*) agar hak fakir miskin tidak tergerus oleh penyusutan nilai mata uang akibat inflasi.
- 2) Pengakuan Pendapatan: Dalam sistem konvensional, bunga diakui berdasarkan berjalannya waktu (*accrual basis*). Dalam Syariah, pendapatan bagi hasil diakui berdasarkan realisasi usaha (*cash basis* atau *modified cash basis*), sehingga tidak ada pengakuan keuntungan atas sesuatu yang belum pasti (menghindari *gharar*).

4. Dampak Terhadap Transparansi Dan Kesejahteraan Sosial

Implementasi Akuntansi Syariah membawa konsekuensi yang melampaui sekadar pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip agama. Penerapannya berdampak langsung pada peningkatan kualitas transparansi informasi keuangan serta memperkuat kontribusi entitas bisnis terhadap kesejahteraan sosial masyarakat secara luas.

a. Mitigasi Praktik Creative Accounting dan Fraud

Salah satu persoalan utama dalam praktik akuntansi konvensional adalah maraknya *creative accounting*, yaitu manipulasi laporan keuangan yang secara formal masih berada dalam koridor hukum, namun secara substansi menyesatkan pengguna laporan. Dalam Akuntansi Syariah, praktik ini ditekan melalui dua lapisan pengendalian. Pertama, pengendalian internal yang bersifat spiritual, di mana keyakinan akan pengawasan Allah SWT (*muraqabah*) membentuk integritas personal akuntan. Kesadaran ini menanamkan pemahaman bahwa tindakan seperti menyembunyikan kewajiban atau menggelembungkan aset merupakan bentuk kezaliman. Kedua, pengendalian eksternal melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang melakukan pengawasan atas kepatuhan syariah dalam laporan keuangan. DPS memastikan bahwa pendapatan tidak bersumber dari aktivitas yang dilarang, sehingga laporan keuangan mencerminkan kesucian dan kehalalan harta (*thayyiban*).

b. Zakat sebagai Instrumen Distribusi Kekayaan

Dalam sistem akuntansi konvensional, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) umumnya bersifat sukarela dan sering digunakan sebagai sarana pencitraan. Sebaliknya, dalam Akuntansi Syariah, zakat perusahaan merupakan kewajiban yang mengikat dan terukur secara akuntansi. Kehadiran laporan sumber dan penyaluran dana zakat mentransformasikan laporan keuangan menjadi sarana transparansi atas peran perusahaan sebagai agen distribusi kekayaan dari golongan mampu (*aghniya*) kepada golongan yang berhak (*mustahik*). Apabila akuntansi zakat diterapkan secara konsisten dan



jujur oleh seluruh entitas bisnis, maka laporan keuangan dapat berfungsi sebagai instrumen sistematis dalam meminimalkan kesenjangan ekonomi.

c. Laporan Dana Kebajikan (Qardhul Hasan) dan Etika Bisnis

Manifestasi lain dari nilai Islam dalam pelaporan keuangan terlihat pada penyajian laporan dana kebajikan (*qardhul hasan*). Dana ini merupakan pinjaman tanpa imbalan yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan untuk tujuan sosial maupun produktif. Keberadaan laporan ini menunjukkan bahwa entitas syariah tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga pada pencapaian falah atau kesejahteraan sosial. Transparansi atas pengelolaan dana *qardhul hasan* mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat tanpa unsur eksploitasi berbasis bunga.

d. Kepercayaan Stakeholder dan Stabilitas Pasar

Transparansi yang dibangun atas nilai-nilai Islam, seperti kejujuran (*shiddiq*) dan keterbukaan (*tabligh*), mendorong terciptanya tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari para pemangku kepentingan. Investor merasa lebih aman karena perusahaan dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan terhindar dari praktik spekulatif yang mengandung unsur gharar. Tingkat kepercayaan ini berkontribusi pada stabilitas pasar dan kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan, sebagaimana tercermin pada ketahanan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi krisis ekonomi global dibandingkan lembaga konvensional yang sangat bergantung pada *fluktuasi* suku bunga.

5. Tantangan Implementasi Di Era Modern

Meskipun Akuntansi Syariah menawarkan kerangka yang lebih etis dan holistik, penerapannya di tengah dominasi sistem ekonomi global yang sekuler menghadapi tantangan yang kompleks.

a. Harmonisasi Standar Internasional

Salah satu tantangan terbesar adalah adanya dualisme standar. Di satu sisi terdapat **AAOIFI** (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) sebagai rujukan global syariah, dan di sisi lain terdapat **IFRS** (*International Financial Reporting Standards*) yang menjadi standar umum dunia. Seringkali terjadi benturan kepentingan antara pemenuhan aspek syariah (seperti pengakuan zakat atau pelarangan bunga) dengan tuntutan komparabilitas laporan keuangan secara internasional.

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Akuntansi Syariah membutuhkan praktisi yang memiliki kompetensi ganda (*multidisciplinary*). Seorang akuntan syariah tidak hanya harus mahir dalam logika debit-kredit dan analisis rasio keuangan, tetapi juga harus memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum muamalah dan ushul fiqh. Minimnya SDM yang menguasai kedua bidang ini secara seimbang berisiko menjadikan akuntansi syariah hanya sekadar "stempel" formalitas tanpa substansi nilai yang kuat.



c. Adaptasi Digital dan Fintech Syariah

Di era transformasi digital, Akuntansi Syariah ditantang untuk merespons fenomena aset kripto, *smart contracts*, dan perbankan digital. Bagaimana nilai-nilai seperti pelarangan *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi) diimplementasikan dalam sistem akuntansi berbasis *blockchain* menjadi ruang riset baru yang sangat menantang.

KESIMPULAN

Akuntansi Syariah bukan sekadar sistem pencatatan alternatif, melainkan sebuah transformasi paradigma yang menempatkan nilai-nilai Islam sebagai ruh dalam pelaporan keuangan. Melalui integrasi nilai *Tauhid*, *'Adl*, *Amanah*, dan *Shiddiq*, akuntansi berevolusi dari alat hitung laba menjadi instrumen akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT dan akuntabilitas horisontal kepada masyarakat.

Penggunaan struktur laporan yang unik, seperti Laporan Sumber dan Penyaluran Zakat serta Laporan Dana Kebajikan, membuktikan bahwa entitas syariah memikul tanggung jawab sosial yang melekat secara organik. Meskipun tantangan standardisasi dan kompetensi SDM masih membayangi, potensi Akuntansi Syariah dalam menciptakan transparansi yang beretika dan mitigasi krisis moral ekonomi menjadi jawaban atas kegagalan sistem konvensional. Sebagai wujud penerapan nilai Islam, akuntansi syariah menawarkan jalan menuju *Falah*—kesejahteraan yang menyeimbangkan antara kejayaan materiil di dunia dan keselamatan spiritual di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2021). *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain.
- Harahap, S. S. (2011). *Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.
- Meutia, I. (2004). *Strategi Meletakkan Nilai-Nilai Islam pada Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.
- Napier, C. (2009). *Defining Islamic Accounting: Current Issues and Past Roots*. Journal of Islamic Accounting and Business Research.
- Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: Rajawali Pers.